

Peran Pemerintah Desa dalam Peningkatan Pelayanan Sosial di Desa Bakka-bakka

Nurzahrani¹, Nursan Safitri², Muhammad Alwi³

¹Agribisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah

^{2,3}Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah

Zahrani.agr21@itbmpolman.ac.id¹, nursan@itbmpolman.ac.id², muhammadalwi@itbmpolman.ac.id²

Abstrak

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan pelayanan sosial di tingkat lokal, terutama di Desa Bakka-bakka. Sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa bertanggung jawab untuk memastikan tercapainya kebutuhan dasar warga desa, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Di Desa Bakka-Bakka, berbagai program sosial seperti pemberian bantuan langsung, program pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, telah diimplementasikan untuk mendorong kesejahteraan warga. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan infrastruktur yang masih perlu dikembangkan menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pelayanan sosial. Untuk itu, pemerintah desa di Bakka-bakka perlu melakukan inovasi dalam pengelolaan sumber daya dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program tersebut. Dengan pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas perangkat desa, pelayanan sosial di Desa Bakka-bakka dapat lebih efisien dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan sejahtera bagi seluruh warga desa.

Kata kunci: Peran Pemerintah desa; pelayanan sosial; pemerintahan desa;

Korespondensi Email : zahrani.agr21@itbmpolman.ac.id

Diterima Redaksi : 12-09-2025 | **Selesai Revisi** : 29-09-2025 | **Diterbitkan Online** : 30-09-2025

1. Pendahuluan

Pemerintahan desa merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan Indonesia yang berada di tingkat paling bawah dalam struktur administratif negara. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa setiap desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga desa sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah desa terdiri dari dua lembaga utama, yakni Kepala Desa (Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). ¹Kepala desa bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, mulai dari penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan desa, hingga pengelolaan anggaran desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa (Pilkades), yang memberikan legitimasi demokratis atas kepemimpinannya. Sementara itu, BPD berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat desa yang bertugas menyerap dan menampung aspirasi masyarakat, serta memberikan masukan kepada kepala desa dalam pengambilan kebijakan, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. BPD juga terlibat dalam proses pembuatan peraturan desa yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintahan desa perlu didukung dengan data dan informasi yang akurat dan terperinci tentang kondisi desa. Oleh karena itu, Dapus atau Data Pokok Desa menjadi elemen yang sangat penting. Dapus adalah sistem pengelolaan data yang mencakup berbagai aspek kehidupan di desa, seperti jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi, potensi sumber daya alam, serta infrastruktur yang ada. Pengelolaan data desa yang baik dapat mempermudah perencanaan pembangunan, menentukan prioritas kebutuhan masyarakat, serta membantu pemerintah desa dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang valid dan up-to-date. Sebagai contoh, data tentang jumlah penduduk miskin atau distribusi usia produktif di desa akan membantu

pemerintah desa dalam merencanakan program-program pembangunan yang lebih tepat sasaran, seperti program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintahan desa tidak hanya ditentukan oleh struktur pemerintahan yang ada, tetapi juga oleh kualitas data yang dimiliki serta cara pengelolaannya.

Pemerintahan desa juga diatur dengan berbagai peraturan pelaksanaan, seperti Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang memberikan pedoman lebih rinci tentang struktur organisasi dan kewenangan pemerintahan desa, serta peran perangkat desa dalam menjalankan tugas-tugasnya. Peraturan-peraturan ini penting agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip otonomi desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Selain itu, sistem pengelolaan data seperti Dapus juga diatur oleh pedoman dari Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat digunakan secara maksimal dalam perencanaan pembangunan desa, evaluasi program, serta penyusunan kebijakan yang lebih efektif.

Dengan adanya pemerintahan desa yang terstruktur dengan baik dan dilengkapi dengan sistem pengelolaan data yang transparan, diharapkan desa dapat berkembang lebih pesat, masyarakat desa bisa menikmati layanan publik yang lebih baik, dan kesejahteraan masyarakat desa bisa meningkat. Semua ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah desa, BPD, serta masyarakat itu sendiri, yang bersinergi untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pemerintah Desa memainkan peranan penting dalam meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat di tingkat desa. Sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat, Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan sosial warga, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Melalui penggunaan dana desa yang tepat dan transparan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program sosial, Pemerintah Desa dapat memastikan bahwa pelayanan sosial yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan lembaga swadaya masyarakat, sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sosial. Dengan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan, Pemerintah Desa dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh warga desa.

Pelayanan sosial adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Pelayanan sosial mencakup berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan sosial. Tujuan dari pelayanan sosial adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk hidup dengan layak, serta untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Pelayanan sosial dilaksanakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan komunitas lokal. Pemerintah, melalui kebijakan dan program-programnya, memiliki peran yang signifikan dalam penyediaan pelayanan sosial, baik melalui layanan langsung maupun melalui pengaturan dan pengawasan terhadap penyedia layanan oleh pihak lain.

Peningkatan pelayanan sosial di tingkat desa tidak hanya bergantung pada peran aparatur desa saja, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui musyawarah desa (musdes) yang berfungsi sebagai forum untuk menampung aspirasi, keluhan, dan saran dari warga desa. Dengan adanya musdes, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program pelayanan sosial. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program yang dijalankan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa. Informasi terkait anggaran dan realisasi program harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses, seperti papan

informasi desa atau media sosial. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana desa, sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan.

Pemerintah Desa juga perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat, universitas, dan sektor swasta, untuk memperluas jangkauan dan cakupan pelayanan sosial. Kolaborasi ini dapat memberikan manfaat tambahan, seperti pendanaan, pelatihan, dan bantuan teknis yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial.

Pada akhirnya, keberhasilan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan sosial sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kemauan dari seluruh pihak, baik pemerintah desa, masyarakat, maupun stakeholder lainnya, untuk bekerja sama secara sinergis dalam mewujudkan desa yang sejahtera dan berkeadilan.

Pemerintah Desa Bakka-bakka menghadapi berbagai permasalahan dalam upaya meningkatkan pelayanan sosial. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia. Dana desa yang terbatas sering kali tidak mencukupi untuk melaksanakan program-program pelayanan sosial secara komprehensif. Selain itu, kurangnya tenaga ahli di bidang pelayanan sosial juga dapat menghambat efektivitas program. Partisipasi masyarakat yang rendah menjadi masalah lain yang signifikan. Kurangnya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap pemerintah desa, dapat mengurangi keberhasilan program pelayanan sosial. Metode Pelaksanaan

Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga menjadi tantangan besar. Pengelolaan dana yang kurang transparan dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat. Selain itu, kesulitan dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan transparan dapat menjadi kendala. Kerjasama antar pihak juga sering kali kurang optimal. Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga terkait, seperti LSM, universitas, dan sektor swasta, dapat mengurangi efektivitas program pelayanan sosial. Selain itu, dukungan teknis dari pihak eksternal yang memiliki keahlian khusus di bidang pelayanan sosial sering kali tidak memadai.

2. Metode Pelaksanaan

penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan. Analisa data dilakukan dengan analisis policy terhadap hasil wawancara, pengamatan atau observasi, pengumpulan data sekunder. Analisis ini digunakan untuk melakukan proses terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah (Pasolong, 2012:73). Analisis ini digunakan untuk menggambarkan tentang implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap optimalisasi pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan desa yang dapat meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pemerintahan desa di Desa Bakka-Bakka.



Gambar 1 Pelayanan masyarakat dalam pembuatan surat



Gambar 2 Pemberian makanan tambahan ibu hamil dan anak yang kurang gizi



Gambar 3 Pelayanan terhadap tim survey politik tentang permintaan data Masyarakat



Gambar 4. Pembuatan pajak dari Dinas Pendapatan Daerah

3. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Desa Bakka-bakka telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan sosial dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa yang efektif. Program kesehatan seperti posyandu dan pemberian beasiswa pendidikan telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, implementasi program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan juga berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi warga desa, terutama kaum wanita dan pemuda. Transparansi dalam pengelolaan dana desa menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan program pelayanan sosial di Desa Bakka-bakka. Informasi terkait anggaran dan pelaksanaan program disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan informasi desa dan media sosial, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa juga ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan program pelayanan sosial sangat terlihat, menunjukkan bahwa masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program yang dijalankan. Kerjasama dengan berbagai pihak eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat, universitas, dan sektor swasta juga memberikan dukungan tambahan berupa pendanaan, pelatihan, dan bantuan teknis yang sangat bermanfaat. Kolaborasi dengan pihak eksternal ini membantu memperluas cakupan dan jangkauan pelayanan sosial, sehingga lebih banyak warga yang dapat merasakan manfaatnya.

Strategi identifikasi kebutuhan sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Bakka-bakka sangat efektif dalam menggali kebutuhan riil masyarakat dan menetapkan prioritas program yang tepat. Rencana kerja yang detail dan penganggaran yang efektif menjadi kunci sukses dalam implementasi program pelayanan sosial. Pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi menunjukkan hasil positif dengan meningkatkan kemandirian ekonomi warga desa. Keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa membangun kepercayaan masyarakat, sementara pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program meningkatkan rasa tanggung jawab bersama. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa mereka merasa memiliki program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa, yang juga meningkatkan efektivitas program karena masyarakat ikut memantau dan mengawasi pelaksanaannya.

Kerjasama dengan lembaga eksternal memberikan nilai tambah bagi program pelayanan sosial, dengan dukungan pendanaan, pelatihan, dan bantuan teknis dari pihak eksternal memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam memberikan pelayanan sosial. Meskipun banyak pencapaian positif, masih ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kendala teknis dalam pelaksanaan program. Solusi yang ditempuh antara lain melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan optimalisasi kerjasama dengan pihak eksternal. Secara keseluruhan, Pemerintah Desa Bakka-bakka telah menunjukkan peran yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan sosial bagi masyarakatnya. Dengan perencanaan yang matang, transparansi, partisipasi aktif masyarakat, dan kerjasama dengan pihak eksternal, pelayanan sosial di Desa Bakka-bakka dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh warganya.

4. Simpulan

Pemerintah Desa Bakka-bakka memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pelayanan sosial. Mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan sosial masyarakat, merencanakan dan melaksanakan program yang sesuai, serta memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak dan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan juga sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas pelayanan sosial. Dengan metode yang tepat dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan pelayanan sosial di Desa Bakka-bakka dapat terus meningkat, sehingga kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat terwujud bagi seluruh warga desa.

Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, Pemerintah Desa Bakka-Bakka dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk berbagai program pelayanan sosial. Program-program ini mencakup layanan kesehatan seperti posyandu, serta bantuan langsung kepada warga yang membutuhkan. Selain itu, pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi fokus penting untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan warga desa.

Kerjasama dengan berbagai pihak eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat, universitas, dan sektor swasta dapat memberikan dukungan tambahan dalam bentuk pendanaan, pelatihan, dan bantuan teknis yang diperlukan. Hal ini akan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial yang diberikan. Keterlibatan aktif masyarakat melalui musyawarah desa dan forum-forum diskusi lainnya akan memastikan bahwa program-program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program juga sangat penting untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, masyarakat akan merasa lebih percaya dan mendukung program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Bakka-bakka.

Pada akhirnya, peran Pemerintah Desa yang efektif dan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat serta kerjasama dengan berbagai pihak akan mewujudkan pelayanan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, kesejahteraan sosial di Desa Bakka-bakka dapat terus meningkat, membawa manfaat yang nyata bagi seluruharganya.

Keberhasilan program pelayanan sosial di Desa Bakka-bakka juga sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi dapat membantu dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan program pelayanan sosial. Misalnya, dengan mengimplementasikan sistem informasi manajemen desa, Pemerintah Desa dapat lebih mudah dalam melakukan pencatatan, monitoring, dan evaluasi program-program yang berjalan. Selain itu, penggunaan media sosial dan aplikasi komunikasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta memudahkan penyebaran informasi terkait program pelayanan sosial.

Pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa tidak dapat diabaikan. Peningkatan kapasitas melalui berbagai pelatihan akan membantu aparatur desa dalam memahami dan menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Pelatihan ini bisa mencakup manajemen keuangan, perencanaan pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan teknik pemberdayaan masyarakat. Dengan memiliki aparatur desa yang kompeten, diharapkan program-program pelayanan sosial dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Kerjasama antara Pemerintah Desa Bakka-bakka dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga dapat memberikan manfaat besar. Melalui penelitian dan kajian ilmiah, Pemerintah Desa dapat memperoleh data dan informasi yang akurat sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan sosial. Selain itu, hasil penelitian juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi yang tepat.

Tidak kalah penting adalah adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan yang mendukung serta regulasi yang jelas akan mempermudah Pemerintah Desa dalam melaksanakan program-program pelayanan sosial. Dengan adanya kebijakan yang konsisten dan tidak berubah-ubah, program pelayanan sosial dapat berjalan dengan lebih lancar dan terarah.

Pada akhirnya, sinergi antara semua pihak, baik pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, universitas, sektor swasta, dan pemerintah pusat dan daerah, adalah kunci untuk mencapai peningkatan pelayanan sosial yang optimal di Desa Bakka-bakka. Dengan komitmen dan kerjasama yang baik, pelayanan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan akan dapat terwujud, membawa manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat Desa Bakka-Bakka.

5. Daftar Rujukan

- [1] Arif, M. (2016). Manajemen Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Buku ini memberikan wawasan mengenai manajemen pemerintahan di tingkat desa, termasuk tugas dan fungsi kepala desa serta lembaga-lembaga yang ada di desa seperti BPD.
- [2] Hermanto, A. (2015). Manajemen Pemerintahan Desa. Bandung: Alfabeta.
- [3] Hajar, S. H., Ali, K., et al. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hummaniora*, 6 (1), 136.
- [4] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). Panduan Pelaksanaan Dana Desa. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- [5] Sutoro Eko. (2014). Desa Membangun Indonesia. Jakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa.
- [6] Segal, E. A. (2013). Social Welfare Policy and Social Programs: A Values Perspective. Belmont: Brooks/Cole.
- [7] Suharto, E. (2006). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama
- [8] Slamet, M. (2017). Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [9] Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.